

**PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN
FAKIR MISKIN OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN SIAK TAHUN 2018**

Oleh : Tomas Sugianto

thomasmblokee@gmail.com

Pembimbing : Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Wadya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-6377

ABSTRACT

Poverty creates various social problems caused by poverty itself. The problem of poverty is the source of many other social problems such as crime, unemployment, stupidity, low health levels, and others. Poverty management is also regulated in Law no. 13 of 2011 concerning Handling the Poor. Poverty alleviation is one of the government's tasks, where in Presidential Regulation Number 96 of 2015 concerning the Acceleration of Poverty Reduction article 1 states that poverty alleviation is government and regional government policies and programs that are carried out in a systematic, planned and synergized manner with the business world and society to reduce the number of poor population in order to increase the degree of welfare. The poverty line in Siak Regency from 2016 to 2018 continues to increase, this can be seen from the data released by the Siak Regency Central Bureau of Statistics.

This research was conducted with the first objective, to describe the Implementation of the Social Empowerment and Handling of the Poor Program by the Social Service of the Siak Regency in 2018. Second, to find out the inhibiting factors for the Implementation of the Social Empowerment and Handling of the Poor Program by the Social Service of the Siak Regency in 2018. In This study uses a qualitative approach, and this type of research is descriptive, data collection techniques by conducting interviews, and using competent sources/informants.

The results that can be concluded from this research are that the Implementation of the Social Empowerment Program and Handling the Poor by the Siak Regency Social Service in 2018 has not been implemented optimally, because there are still deficiencies in social empowerment program services and handling the poor so that future empowerment is not implemented for the community poor.

Keywords: Implementation, Empowerment Program, Poverty.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemberantasan kemiskinan memang telah menjadi agenda utama untuk dilakukan oleh pemerintah sejak Indonesia merdeka. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila berbagai kebijakan maupun program telah banyak dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna mengatasi persoalan kemiskinan yang mencengkeram negeri ini.. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat 1, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kemiskinan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang diakibatkan oleh kemiskinan itu sendiri. Permasalahan kemiskinan menjadi sumber dari banyak permasalahan sosial lainnya seperti, kriminalitas, pengangguran, kebodohan, tingkat kesehatan yang rendah, dan lain-lain. Penanganan kemiskinan juga diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tugas pemerintah, dimana dalam Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pasal 1 menyebutkan penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan besinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk

mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi disuatu negara. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya seperti program peningkatan kesejahteraan dan asuransi pengangguran untuk melakukan kemiskinan.

Garis kemiskinan di Kabupaten Siak dari tahun 2016 hingga 2018 terus mengalami kenaikan hal ini dapat dilihat dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak, berikut adalah tabel data garis kemiskinan di Siak tahun 2016-2018 :

Tabel 1.1
Data Garis Kemiskinan di Kabupaten Siak dari Tahun 2016-2018

Tahun	Garis Kemiskinan
2016	391.093
2017	414.501
2018	431.814

Sumber : Badan Pusat Data dan Stasistik

Dari tabel diatas bisa kita ketahui bahwa angka garis kemiskinan terus meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Selain itu dapat dilihat angka kejahatan yang dilaporkan berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau pada tabel 1.2 dibawah ini :

Tabel 1.2
Jumlah Kejahatan yang
Dilaporkan pada tahun 2017-2018 di
Provinsi Riau berdasarkan
Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan	
	2017	2018
Kuantan Singingi	402	337
Indragiri Hulu	775	660
Indragiri Hilir	376	314
Pelalawan	438	428
Siak	467	516
Kampar	1121	1090
Rokan Hulu	886	779
Bengkalis	659	658
Rokan Hilir	786	844
Kepulauan Meranti	159	147
Pekanbaru	2026	2190
Dumai	665	646

Sumber : Badan Pusat data dan Statistik Riau

Dari tabel di atas dapat kita lihat jumlah angka kejahatan yang dilaporkan di Kabupaten/Kota di Riau yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat yang pelakunya tertangkap oleh kepolisian. Angka kejahatan yang dilaporkan di Kabupaten Siak mengalami kenaikan dari 467 pada tahun 2017 menjadi 516 pada tahun 2018. Dalam Rencana Strategis (*RENSTRA*) Dinas Sosial Kabupaten Siak terdapat sebanyak 17 kegiatan yang direncanakan dalam Proram Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Siak. Pada tahun 2018 yang terlaksana ada 4 dan salah satu kegiatan yang dilaksanakan yaitu sebagai berikut : Kegiatan Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Terus meningkatnya angka garis kemiskinan dan angka kejahatan yang dilaporkan di Kabupaten Siak dari tahun ke tahun sampai pada tahun 2018
2. Rendahnya pelaksanaan atau realisasi kegiatan dari perencanaan dalam program Pemberdayaan Sosil dan Penanganan Fakir Miskin yang dibuat oleh Dinas Sosial Kabupaten Siak pada tahun 2018 , dari 17 kegiatan yang direncanakan hanya 4 dilaksanakan pada tahun 2018.

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin oleh Dinas Sosial Kabupaten Siak Tahun 2018.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin oleh Dinas Sosial Kabupaten Siak Tahun 2018.

KERANGKA TEORI

Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh David C. Korten. Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Model kesesuaian

Korten adalah sebagai berikut : Program itu sendiri, Pelaksana Program, dan Kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program sebagai berikut :

Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). *Kedua*, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. *Ketiga*, kesesuaian antar kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antar syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan kalau tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan apabila *output* program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, jelas *output* tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan *output* program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat

dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan *output* program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan jenis penelitian ini adalah deskriptif. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui informan penelitian dan dokumen.

Tabel 1.3 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan/ Kedudukan Informan
1	H . Khairul Bahri, S.Ag	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
2	Eni Maryanti, SE, M.Si	Seksi Pemberdayaan, Bantuan Stimulan dan Restorasi Sosial
3	Darmansyah	Pendamping
4	Suparno	Pendamping
5	Hadi	Pendamping
6	Juwanti	Penerima Bantuan
7	Dede Wijaya	Penerima Bantuan
8	Afrizon	Penerima Bantuan

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Oleh Dinas Sosial Kabupaten Siak Tahun 2018

Dalam setiap program, tentu terdapat tahapan-tahapan pelaksanaan agar program yang di jalankan sesuai dan pada akhirnya mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pada tahapan program, terdapat tahapan implementasi atau yang biasa disebut pelaksanaan. Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh David C. Korten. Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program.

Korten menggambarkan model ini berisikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksana program, dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, Kesesuaian antara program dan dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang diisyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu

kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

1. Program itu sendiri

Pada elemen yang pertama yaitu program itu sendiri, salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuat peraturan daerah, dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Siak Pasal 7 Ayat (1). Namun dalam perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah khususnya Dinas Sosial minim sekali mengajak masyarakat berpartisipasi atau mensosialisasikan kegiatan apa yang akan dilaksanakan atau di berikan kepada sasaran dari program.

2. Pelaksana Program

Pada elemen yang kedua yaitu pelaksana program, dalam pelaksanaan kegiatan semua struktur organisasi memiliki tugas dan fungsi yang disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Dan penetapan untuk menjadi pembina lapangan program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dengan memberikan pembekalan dan pelatihan yang sudah terverifikasi kepada para pembina lapangan. Ini dilakukan agar

fasilitator memenuhi unsur kelayakan dalam memahami dan menyampaikan program dengan baik nantinya kepada sasaran penerima program.

3. Kelompok Sasaran (Pemanfaat)

Pada elemen yang ketiga yaitu kelompok sasaran atau pemanfaat, pada elemen ini yaitu para kelompok sasaran seharusnya bisa memanfaatkan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang diberikan pemerintah namun di lapangan mereka masih belum bisa memanfaatkan bantuan yang telah diberikan. Hal itu terjadi minimnya pelatihan yang diberikan oleh Dinas Sosial sehingga pemanfaat tidak bisa mengembangka potensi dari usaha yang mereka jalankan. Seharusnya dari pelaksana dan pemanfaat harus saling berkoordinasi antara satu sama lain agar program yang telah direncanakan dapat dijalankan sesuai dengan tujuannya.

2. Faktor-faktor Penghambat Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Siak Tahun 2018.

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin terdapat dua faktor yang menjadi penghambat, yaitu sebagai berikut :

2.1 Faktor Internal

Faktor ini bersumber dari dalam, seperti gagasan, ide, informasi, dan pernyataan yang dapat memberikan dampak positif dan juga negatif. Berikut beberapa faktor internal dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Siak tahun 2018 yaitu :

- Kurangnya Sarana dan Prasarana
- Keterbatasan Anggaran
- Belum optimalnya Teknologi dan informasi.

2.2 Faktor Internal

Faktor eksternal adalah segala faktor yang berasal dari luar dan bisa menjadi pemicu masalah dan menjadipenghambat dalam menjalankan strategi yang sudah dibentuk.

- Partisipasi Masyarakat
- Dukungan Lintas Sektor dalam pelaksanaan Program belum Optimal.

Dalam faktor internal hambatan yang *Pertama* adalah kurangnya sarana dan prasarana seperti transportasi dan akses menuju lokasi masi sulit dijangkau dan hanya bisa di jangkau dengan transportasi tertentu. *Kedua* adalah keterbatasan anggaran yang menjadi salah satu penghambat dalam kegiatan ini, kerana kegiatan yang terlaksana terbatas dan sulit dikembangkan. *Ketiga* adalah belum optimalnya penggunaan teknologi dan informasi baik dari pelaksana maupun penerima program membuat kegiatan lambat untuk berkembang. Dan dalam

faktor eksternal yang *Pertama* adalah partisipasi masyarakat dalam program ini, pelibatan masyarakat untuk berpartisipasi baik berupa ide ataupun gagasan dalam perenanaan program ini sangat minim akibat tidak adanya diskusi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat. *Kedua* adalah dukungan lintas sektor dalam pelaksanaan program belum optimal karena untuk meningkatkan pemberdayaan akan lebih cepat dilakukan secara bersama sama, namun dalam pelaksanaan pemberdayaan ini masih minim dukungan dari lintas sektor sehingga hanya Dinas Sosial sendiri yang bergerak dalam pelaksanaan program ini.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan untuk melihat pelaksanaan Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin oleh Dinas Sosial tahun 2018, maka didapati kesimpulan sebagai berikut :

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin oleh Dinas Sosial Kabupaten Siak tahun 2018 belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut ditinjau dari beberapa indikator yaitu : ketepatan kegiatan dalam program, pelaksana program, sasaran program. Dimana walaupun kegiatan dilaksanakan namun masih belum berjalan optimal karena masih belum berjalan dengan baik antara ketiga indikator tersebut terutama pada indikator sasaran program atau penerima. Minimnya sosialisasi serta pelatihan dari pelaksana kegiatan kepada sasaran yang akan menerima bantuan dari program tersebut sehingga tidak terjadi

pemberdayaan yang berjangka kepada sasaran.

Adapun faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Sosial dan dan Penanganan Fakir Miskin dapat dilihat dari faktor internal dan faktor eksternal. *Pertama* Faktor Internal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin yaitu sarana dan prasarana yang belum mendukung. Sangat minimnya anggaran yang direalisasikan pemerintah daerah terhadap program pemberdayaan sosial dan pemberdayaan fakir miskin sehingga kegiatan yang dilakukan belum berjalan secara optimal dan tidak optimalnya dalam memanfaatkan perangkat teknologi dan informasi dalam melaksanakan kegiatan.

Kedua Faktor Eksternal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan penanganan fakir miskin yaitu kurangnya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program sehingga tidak tercapai ide atau apa saja yang dibutuhkan fakir miskin sehingga kegiatan tidak yang dilaksanakan tidak tidak berjalan optimal, kegiatan yang dilaksanakan kurang bervariasi sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan diharapkan atau dibutuhkan masyarakat, serta minimnya dukungan dari lintas sektor dalam pelaksanaan program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Pendidikan Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Press.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Ahmadi, Rulam. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ambar Teguh Sulistyani, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Arif Rohman. 2009. *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta:LaksBang Mediatama.
- Erwan Agus, Dyah Ratih. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media.
- Moleong. Lexy J. 2017. *Metodolgi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sibagyo, P. Joko. 2011. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta :Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama
- Suryabrata, Sumdai. 2008. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Usman, Husaini & Akbar, Prunomo Setiady. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Usman Sunyoto, 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Wirutomo, Paulus, DKK. 2012. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press)

Artikel Ilmiah

Ariska Suriyanti (2021) dalam skripsinya yang berjudul “ *Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Fakir Miskin di Kota Makassar*”

Dasril Arifin, 2013, *Peran Dinas Sosial Terhadap penanggulangan Angka*

Kemiskinan Di Kabupaten Siak (Studi Kasus Di Kecamatan Mandau).
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim:
Skripsi S1 Ilmu Administrasi Negara.

Endang Setiowati, 2018. *Faktor-Faktor Pendorong Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Siak Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Tahun 2011-2015).* JOM FISIP Vol. 5 No. 1- April 2018.

Erna Setijaningrum (2017) dalam jurnal yang berjudul "*Program terpadu penanganan kemiskinan di Kota Surabaya*"

Yogi Suprayogi Sugandi (2016) dalam jurnalnya yang berjudul "*Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan : Pengalaman Kota Bandung*

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Siak.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak.

Peraturan Bupati Siak Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Siak.

Dokumen Lainnya

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Data Badan Pusat Data dan Statistik

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.